

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DISHUBKOMINFO
KABUPATEN TASIKMALAYA

2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas perkenannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 yang menggantikan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Secara substantif, LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 merupakan gambaran dari capaian kinerja selama Tahun 2024 yang sudah diselesaikan, didalamnya memuat tentang capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan, faktor penghambat dan pendukung, yang kesemuanya adalah wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Melalui LKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dapat diukur pencapaian misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024 yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Laporan kinerja yang merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat);

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Kami menyadari masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya senantiasa berbenah dan mengadakan evaluasi secara berkala demi terwujudnya kinerja yang meningkat.

Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat bagi evaluasi dan peningkatan kinerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tasikmalaya, Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi	9
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	12
1.4 Isu Aktual.....	8
1.5 Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis	25
2.2 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Analisis Kinerja	63
3.3 Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV PENUTUP	74
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	12
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia.....	13
Tabel 1.6 s/d Tabel 1.10	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.....	29
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	31
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	34
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	37
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.....	11
------------	--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika serta persandian;
- c. menyelenggarakan perumusan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten;
- g. menyelenggarakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- h. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;
- k. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;
- l. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

2. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Dinas.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas :

Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

lalu lintas meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan operasi.

a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

Seksi manajemen rekayasa lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten.

b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.

Seksi pembinaan, pengawasan dan operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan operasi kegiatan lalu lintas.

4. Bidang Angkutan:

Bidang angkutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

a. Seksi Bina Usaha Angkutan;

Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan usaha angkutan.

b. Seksi Jaringan Transportasi.

Seksi jaringan transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan.

5. Bidang Sarana dan Prasarana:

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.

a. Seksi Sarana Lalu Lintas;

Seksi sarana lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana lalu lintas.

b. Seksi Teknik Prasarana Angkutan:

Seksi teknik prasarana angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

6. Bidang Informasi Komunikasi Publik

Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik.

a. Seksi Informasi Publik;

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

b. Seksi Komunikasi Publik;

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan komunikasi publik, dan hubungan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.

7. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan infrastruktur informatika, aplikasi informatika dan database, keamanan informasi dan persandian.

a. Seksi Jaringan Infrastruktur;

Seksi Infrastruktur Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi domain dan infrastruktur.

b. Seksi Intregasi dan Pengembangan informatika;

Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan pengelolaan, pengembangan dan penerapan e-government.

c. Seksi Persandian;

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan keamanan informasi, informasi sandi, dan perangkat sandi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

a. UPTD Pengelola Terminal;

UPTD Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan terminal.

1.3 ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Aspek Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode bulan Desember 2024 sebanyak orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon

NO	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	II	1	
2	III	6	
3	IV	16	
4	FUNGSIONAL UMUM	35	PPPK 3 orang
5	FUNGSIONAL TERTENTU	13	
TOTAL		71	

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
3	Pembina (IV/a)	4	
4	Penata Tk. I (III/d)	20	
5	Penata (III/c)	8	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	13	
7	Penata Muda (III/a)	10	
8	Pengatur Tk. I (II/d)	7	
9	Pengatur (II/c)	7	
10	PPPK	3	
11	Pengatur Muda (II/a)	-	
TOTAL		74	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	S2	16	
2	S1	23	
3	Diploma	14	PPPK 3 orang
4	SLTA	17	
5	SLTP	1	
6	SD	-	
TOTAL		71	

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PRIA	58	PPPK 3 orang
2	WANITA	13	
TOTAL		71	

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	KETERANGAN
1	➤ 50	30	
2	➤ 40	28	
3	➤ 30	10	3 orang PPPK
4	20 - 30	3	
TOTAL		71	

2. Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Daftar Inventaris Aset

Tabel 1.6
Daftar Inventaris Aset

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai Aset
1	KIB A (TANAH)	8.785.409.514
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	63.624.884.813,25
3	KIB C (BANGUNAN)	12.530.012.437,75
4	KIB D (PENGAIRAN DAN IRIGASI)	18.625.206.561
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	9.187.705
6	KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)	-

2. Fasilitas Kerja

Tabel 1.7
Fasilitas Kerja

No.	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kon disi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
1.	Pagar Halaman/Benteng	1	unit	Baik	terpenuhi
2.	Gedung Kantor/Sekretariat	1	unit	Baik	terpenuhi
3.	Gedung Pengujian	1	unit	Baik	terpenuhi
4.	R. Kerja Kepala Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
5.	R. Rapat	1	Ruang	Baik	terpenuhi
6.	R. Kerja Sekretaris Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
7.	R. Kerja Kasubag Keuangan, Program dan Aset	1	Ruang	Baik	terpenuhi
8.	R. Kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
9.	R. Kerja Staf Sekretariat Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
10.	R. Kerja Kepala Bidang Lalulintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
11.	R. Kerja Kasi MRL	1	Ruang	Baik	terpenuhi
12.	R. Kerja Kasi DALOP	1	Ruang	Baik	terpenuhi
13.	R. Kerja Pelaksana Bidang Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
14.	R. Kerja Kepala Bidang Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi

15.	R. Kerja Kasi Bina Usaha Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi
16.	R. Kerja Kasi Jaringan Transfortasi	1	Ruang	Baik	terpenuhi
17.	R. Kerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
18.	R. Kerja Kasi Teknis Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
19.	R. Kerja Kasi Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
20.	R. Kerja Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
21.	R. Kepala UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
22.	R. Staf UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
23.	R. Kepala UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
24.	R. Staf UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
25.	R. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi
26.	R. Staf UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi
27.	R. Pengujian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
28.	Musholla	1	Ruang	Baik	terpenuhi

29.	Kendaraan Dinas Jabatan	7	unit	Baik	terpenuhi
30.	Kendaraan Dinas Operasional	4	unit	Baik	8
31.	Kendaraan Operasional Lapangan	2	unit	K. Baik	2
32.	Kendaraan Crane	1	unit	K. Baik	1
33.	Kendaraan Derek	-	-	-	1
34.	Sepeda Motor Lapangan	2	unit	Baik	7
35.	Sepeda Motor Dinas Perorangan	14	unit	Baik	20
36.	Komputer PC	24	unit	Baik	24
37.	Laptop	35	unit	Baik	35
38.	Printer	30	unit	Baik	Terpenuhi
39.	AC	10	unit	Baik	terpenuhi
40.	Meja Biro	2	unit	Baik	terpenuhi
41.	Meja ½ Biro	8	unit	Baik	terpenuhi
42.	Lemari Kayu	8	unit	Baik	terpenuhi
43.	Lemari Kaca	2	unit	Baik	terpenuhi
44.	Lemari Pakaian	-	unit	Baik	5
45.	Meja Rapat	1	unit	Baik	kurang
46.	Kursi Rapat	10	unit	Baik	20
47.	Kursi Putar	20	unit	Baik	30
48.	Kursi Citos	59	unit	Baik	15
49.	Kursi Tamu	11	unit	Baik	5
50.	Filling Kabinet	13	unit	Baik	terpenuhi

51.	Papan Data	3	unit	Baik	10
52.	Mesin Tik	3	unit	Baik	7
53.	Infocus	3	Unit	Baik	terpenuhi
54.	Kamera	2	Unit	Baik	terpenuhi
55.	Mesin Penghancur/Pengging Kertas	3	unit	Baik	terpenuhi
56.	Alat Pengujian Kendaraan	1	unit	K. Baik	1
57.	Alat Pengujian Statis	1	unit	K. Baik	1

3. Terminal/TPK/TPR Tahun 2024

Tabel 1.8
Terminal

No	Nama Terminal/TPK/TPR	Tanah		Pos	
		Luas	Status	Ada	Tdk Ada
1	Terminal Rajapolah	8.120 M2	Milik Pemda	√	
2	TPK/TPR Sukaraja	2.137 M2	Milik Desa	√	
3	TPK/TPR Pagerageung	70 M2	Milik Desa	√	
4	TPK/TPR Simpang	1.440 m2	Milik Desa	√	
5	TPK/TPR Manonjaya			√	
6	TPK/TPR Rancabakung	5.000 M2	Milik Desa	√	
7	TPK/TPR Cibalong	350 M2	Milik Desa	√	
8	TPK/TPR Cineam	8.000 M2	Milik Pemda	√	
9	TPK/TPR Salopa				√
10	TPK/TPR Cikatomas	1.400 M2	Milik Pemda		√
11	TPK/TPR Taraju	15 m2	Milik Desa	√	
12	TPK/TPR Gunungtanjung			√	

13	TPK/TPR Cikalong	1.825 M2	Milik Desa	√	
14	TPK/TPR Sodonghilir	1.000 M2	Milik Desa	√	
15	TPK/TPR Buniasih	5.000 M2	Milik Desa	√	

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.9
Fasilitas Perhubungan yang Terpasang

Uraian	Satuan	2023	2024	Jumlah Kebutuhan	Persentase
Penerangan Jalan Umum	buah	10	102	867	12,91%
Rambu Rambu Lalu Lintas	buah	838	-	1.496	56,01%
Warning Light dan Traffic Light	buah	-	-	-	-
Marka Jalan	meter	-	-	-	-
Guard Rail	meter	24	-	1.264	1,89%

Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel diatas adalah jumlah kebutuhan fasilitas perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya.

- c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 1.10
Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Nama Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Unit	ket
		2023	2024	
1	Gedung Pengujian	1	1	
2	Menara air dan Pompa	-	-	
3	Ruang Pemeriksaan	1	1	
4	Ruang Administrasi	1	1	
5	Ruang Konsumen	1	1	
6	Ruang Generator	1	1	
7	Ruang Sarana dan Prasarana	1	1	
8	Alat Uji Asap (Smoke Tester)	1	1	
9	Alat Uji Under Car, Lorong	1	1	
10	Alat uji Side Slip	1	1	
11	Alat uji Lampu utama	1	1	
12	Alat uji Berat ,dan alat uji Rem	1	1	
13	Alat uji Speedo meter / kecepatan	1	1	
14	Alat uji kebisingan	1	1	
15	Alat kegelapan kaca (tin Tester)	1	1	
16	Alat Ukur Dimensi	1	1	
17	Bank	1	1	

1.4 ISU AKTUAL

Yang menjadi Isu Aktual Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Persandian pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kejadian kecelakaan angkutan umum yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Belum tersedianya pelayanan secara elektronik sebagai penunjang pelayanan bidang angkutan;
3. Perusahaan angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya belum ada yang menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan sarana/parasana fasilitas terminal tipe c;
5. Tidak adanya Fasilitas kelengkapan pendukung untuk melaksanakan perhitungan Kinerja Ruas Jalan;
6. Kurang optimalnya kegiatan pemeliharaan maupun pemasangan PJU karena mobil crane yang dimiliki hanya 1 (satu) unit sehingga mobilitas sangat terbatas;
7. Banyaknya Disinformasi dan Berita Hoaks;
8. Pentingnya Keamanan Data dan Privasi;
9. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi di saat krisis;
10. Peran Influencer dalam Komunikasi Publik dalam membentuk opini publik;
11. Komunikasi Publik yang berhubungan dengan Politik Identitas dan Polarisasi Sosial;
12. Keterbukaan Informasi Publik yaitu adanya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan;

13. Terjadinya Transformasi media tradisional ke media digital yang sangat cepat (Revolusi Media) serta Konsumsi Informasi oleh masyarakat melalui berbagai platform;
14. Perlunya Pengembangan JIP sebagai sarana komunikasi internal pemerintah, sebagai layanan akses internet, komunikasi data antar SKPD;
15. Dibutuhkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (data center, backup dan dan Kelistrikan serta pendingin ruangan data center);
16. Perlunya peningkatan keamanan informasi mulai dari pembentukan CISRT dan peningkatan infrastruktur keamanan informasi;
17. Peningkatan SDM (Prakom), Sandiman dan Manggala Informatika;
18. Perlu disusunnya pedoman pelaksanaan layanan domain resmi pemerintah (go.id) terhadap aplikasi berbasis web;
19. Perlunya penerapan Integrasi data melalui teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada aplikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
20. Tidak adanya ruang Laktasi, Fasilitas Difabel, Ruang Tunggu yang nyaman pada Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Tidak adanya Konsultasi dan Banding Pengujian Kendaraan Bermotor;
22. Tidak adanya Unit Kendaraan Uji Keliling;
23. Banyak berkurangnya titik-titik Lokasi parkir;
24. Banyaknya petugas parkir di beberapa daerah yang indisipliner;

25. Adanya pengaruh cuaca hujan menyebabkan aktifitas parkir berkurang;
26. Beralihnya penarikan retribusi parkir ke pihak desa setempat;
27. Penarikan parkir khusus pada kendaraan bongkar muat berkurang karena menurunnya antusias masyarakat dalam uji berkala kendaraan berkurang;
28. Perlu adanya perbaikan secara bertahap fasilitas Terminal Tipe C;
29. Banyak Perusahaan angkutan yang tidak memanfaatkan fasilitas terminal yang tersedia;
30. Optimalisasi terminal untuk tempat melaksanakan Ram Cek, pengujian kendaraan bermotor dan marka area parkir untuk membantu peningkatan PAD.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Struktur Organisasi, Isu Aktual dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang dan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024. Membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta menguraikan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. VISI dan MISI Kabupaten Tasikmalaya

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus di bawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/organisasi, dan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Pada tahun 2021 yang menjadi tahun transisi Rentra akhir tahun 2016-2021 dan menjadi awal mula disusunnya Renstra terbaru tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi kabupaten Tahun 2021-2026, maka Visi yang akan dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya merupakan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “DENGAN SEMANGAN GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) misi:

- *Misi Pertama*, Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkeperibadian dan berakhlakul karimah. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
- Misi Kedua, Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional.

- Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
- Misi Ketiga, Mewujudkan pemerintahan yang melayani melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.
- Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- Misi ke 4 yaitu Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Pada misi 4, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam periode 2021 -2026 yaitu Tujuan 4 Meningkatkan Investasi daerah. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Sasaran 8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,50 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	prosentase tingkat keselamatan jalan	81,20%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	33,00%
3	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,6 Poin
4	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70%
5	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	III

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai, dengan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Tingkat keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan

visinya diukur target kinerja pada tingkat sasaran strategis dan target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2024 untuk pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,50 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkeselamatan	Prosentase tingkat keselamatan jalan	81,20%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	33,00%
3	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,6
4	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70%
5	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	III

Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menetapkan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	43.630.113.297	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.176.193.297	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.847.500	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.847.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.803.897.297	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.803.897.297	
C	Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD	30.000.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.970.000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.970.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.257.880.000	

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.550.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	505.525.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.950.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.260.000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.260.000	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.665.830.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.043.613.500	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.660.000	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.920.000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	505.220.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	
18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	79.700.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.661.145.000	
I	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.350.000.000	
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.950.000.000	
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	400.000.000	
J	KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	291.440.000	
21	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	140.000.000	
22	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	151.440.000	
K	Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	90.000.000	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	
L	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	240.000.000	
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.000.000	

25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.000.000	
M	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	605.805.000	
26	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	468.995.000	
27	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77.080.000	
28	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.730.000	
N	Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota	53.900.000	
29	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.900.000 30.000.000	
30	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.097.775.000	
P	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.097.775.000	
31	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	172.620.000	
32	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	765.155.000	
33	Layanan Hubungan Media	1.160.000.000	
34	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.000.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.492.450.000	
Q	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	299.721.000	
35	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	299.721.000	
R	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.192.729.000	
36	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	685.000.000	

37	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	135.873.900	
38	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	146.000.000	
39	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	55.900.000	
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	169.955.100	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	202.550.000	
S	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	202.550.000	
41	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	202.550.000	

Program-program diatas selanjutnya terbagi dari kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
	TOTAL PAGU	43.630.113.297	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.176.193.297	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.847.500	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.803.897.297	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	30.000.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.970.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.334.025.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.260.000	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.943.273.500	

H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.920.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.661.145.000	
I	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.350.000.000	
J	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	291.440.000	
K	Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	90.000.000	
L	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	240.000.000	
M	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	605.805.000	
N	Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota	53.900.000	
O	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
III	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.097.775.000	
P	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pbulik	3.097.775.000	
IV	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.492.450.000	
Q	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	299.721.000	
R	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.192.729.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	202.550.000	
S	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	202.550.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang bertujuan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Capaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tercermin dari capaian 5 Sasaran Strategis Renstra dan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan hasil strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 mempunyai capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,50 Poin	87,87 Poin	174,00%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan	Persentase tingkat keselamatan jalan	81,20 %	82,19%	101,22%
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	33%	33,14%	100,42%
3.	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,6 Poin	3,1 Poin	193,75%
4.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70%	67,84%	96,91%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	Kategori III	Kategori II	66,67%

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 5 (lima) sasaran menunjukkan sebanyak 4 sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 122,16%.

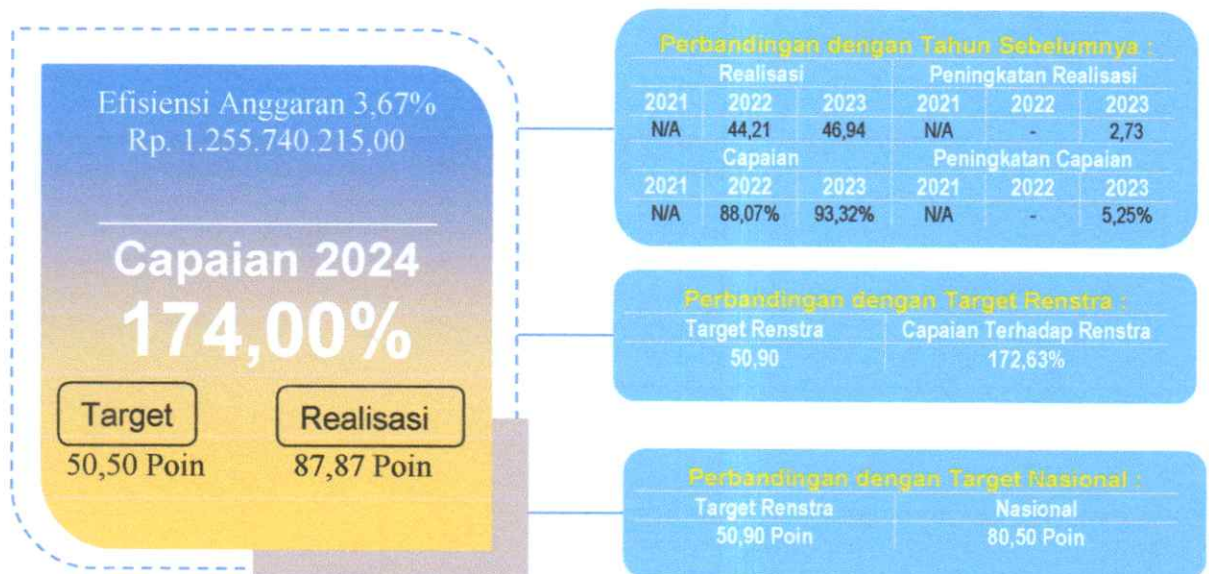
Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan

realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah”

Indikator Kinerja ke-1: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Mulai Tahun 2023 penilaian Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dimana sejak Tahun 2023 terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan

(on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 50,50 poin. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat melalui Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat) dengan total nilai yang diperoleh 87,87 poin kategori "A" (Sangat Baik). Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu 174,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah di Tahun 2021 tidak ditargetkan, pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2022 adalah 44,21 poin kategori “C” (Buruk) dari target yang ditetapkan sebesar 50,20 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 88,07%. Selanjutnya Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2023 adalah 46,94 poin kategori “C” (Buruk) dari target yang ditetapkan sebesar 50,30 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 93,32%. Adapun Nilai RB Dishubkominfo Tahun 2024 adalah 87,87 poin kategori “A” (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 50,50 poin, sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu 174,00% sebagaimana infografis di atas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Untuk Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 87,87 dan sampai dengan akhir renstra di tahun 2026 ditargetkan dapat tercapai dengan nilai 50,90 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka telah jauh terlampaui yaitu sebesar 172,63%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara fungsi Dishubkominfo berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan nilai reformasi birokrasi Dishubkominfo Tahun 2024 dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk realisasi RB Dishubkominfo pada tahun 2024 sebesar 87,87 sedangkan target RB Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2024 sebesar 80,50 hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi RB di Dishubkominfo tahun 2024 melampaui standar Kementerian Perhubungan RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Hasil penilaian indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat melalui Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat) dengan total nilai yang diperoleh 87,87 poin dengan capaian kinerja sebesar 174,00%. Beberapa faktor ataupun penyebab peningkatan kinerja Nilai Reformasi Birokrasi tersebut antara lain :

1. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arahan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Dishubkominfo;
2. Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Dishubkominfo Tahun 2024 untuk melaksanakan peningkatan reformasi birokrasi di Dishubkominfo.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Dishubkominfo telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 174,00%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 3,67% atau Rp. 1.255.740.215,00 dari alokasi anggaran Rp. 34.176.193.297,00 target indikator telah terlampaui.

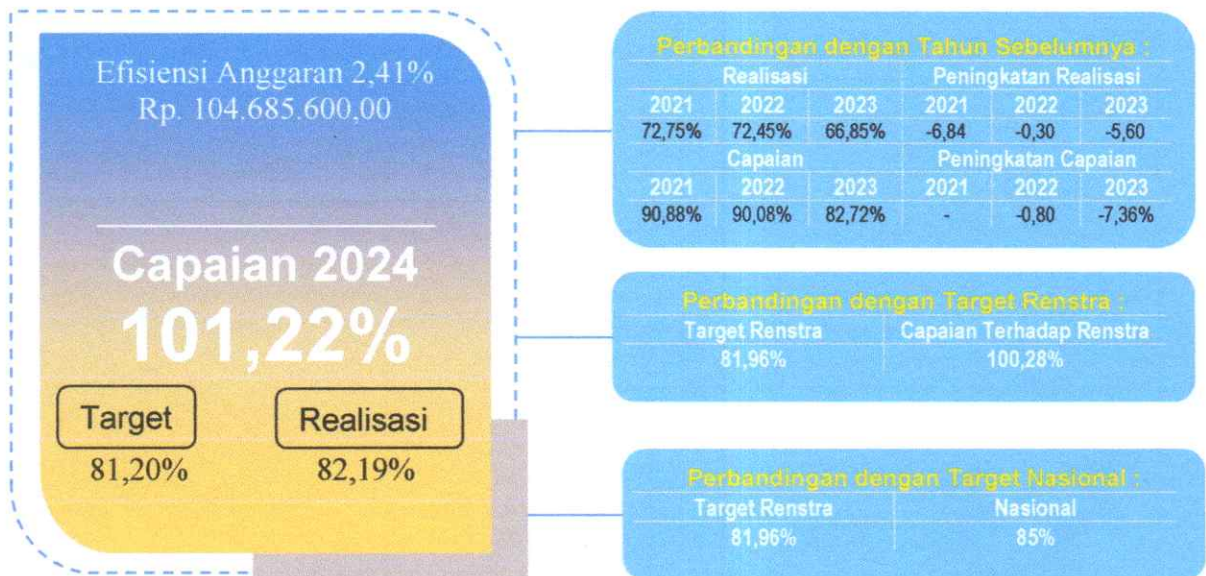
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP, Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu, dan Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan yang dapat mendongkrak penilaian RB Perangkat Daerah dalam hal peningkatan akuntabilitas dan pelayanan Perangkat Daerah. Sehingga realisasi nilai RB pada tahun 2024 melampaui target dengan capaian sebesar 174,00%. Dimana Program ini terdiri dari beberapa kegiatan termasuk sub kegiatan di bawahnya yaitu *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

3.1.2 Sasaran 2

“ Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan”

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Tingkat Keselamatan Jalan



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2024 ditargetkan sebesar 81,20%. Adapun realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan tahun 2024 adalah sebesar 82,19%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 101,22%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 81,20% realisasi kinerja sebesar 82,19% dengan capaian sebesar 101,22%. Untuk tahun 2021 dari target kinerja sebesar 80,05% realisasi kinerja sebesar 72,75% dengan capaian sebesar 90,88%. Selanjutnya Tahun 2022 dari target kinerja sebesar 80,43% realisasi sebesar 72,45% dengan capaian sebesar 90,08%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 80,81% realisasi sebesar 66,85% dengan capaian sebesar 82,72%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2026. Realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2024 adalah sebesar 82,19% sedangkan target akhir tahun renstra Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah sebesar 81,96% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 100,28%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara fungsi Dishubkominfo pada urusan perhubungan berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2024 dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2024 sebesar 82,19% sedangkan target Persentase

Tingkat Keselamatan Jalan Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2024 sebesar 85% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Dishubkominfo Tahun 2024 mendekati standar Kementerian Perhubungan RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan Jalan Tahun 2024 antara lain :

1. Adanya Pemasangan perlengkapan jalan yg tersebar di Ruas Jalan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pengaturan dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Tasikmalaya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan Jalan, Dishubkominfo pada Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 101,22%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 2,44% atau Rp. 104.685.600,00 dari alokasi anggaran Rp. 4.339.705.000,00 target indikator telah terlampaui.

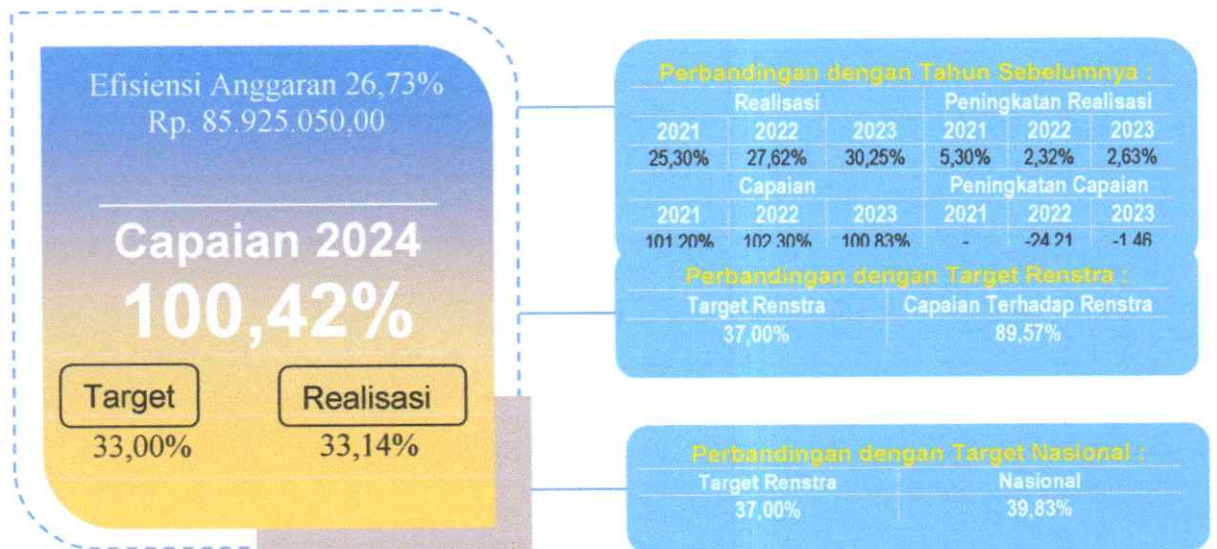
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan kegiatan terdiri dari *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya, kegiatan *Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir* beserta sub kegiatannya, kegiatan *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* beserta sub kegiatannya, dan *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya.

3.1.3 Sasaran 2

“ Meningkatkan Pelayanan Perhubungan yang berkeselamatan”

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2024 ditargetkan sebesar 33,00%. Adapun realisasi Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan tahun 2024 adalah sebesar 33,14%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 100,42%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 33,00% realisasi kinerja sebesar 33,14% dengan capaian sebesar 100,42%. Untuk tahun 2021 dari target kinerja sebesar 25,00% realisasi kinerja sebesar 25,30% dengan capaian sebesar 101,20%. Selanjutnya Tahun 2022 dari target kinerja sebesar 27,00% realisasi sebesar 27,62% dengan capaian sebesar 102,30%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 30,00% realisasi sebesar 30,25% dengan capaian sebesar 100,83%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2026. Realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2024 adalah sebesar 33,14% sedangkan target akhir tahun renstra Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan adalah sebesar 37,00% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 89,57%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara fungsi Dishubkominfo pada urusan perhubungan berada dibawah Kementerian Perhubungan RI sehingga kami membandingkan kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2024 dengan Kementerian Perhubungan RI, untuk realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2024 sebesar 33,14% sedangkan target Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2024 sebesar 39,83% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Dishubkominfo Tahun 2024 masih jauh dari standar Kementerian Perhubungan RI sehingga perlu upaya ekstra untuk mengimbangi standar Kementerian Perhubungan RI.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pemilihan moda transportasi tergantung dari beragam faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan moda transportasi tersebut diantaranya, ciri pengguna, ciri pergerakan dan ciri fasilitas transportasi. Ciri pengguna tergantung pada individu pengguna moda transportasi, seperti struktur rumah tangga, kepemilikan moda transportasi dan tingkat pendapatan. Ciri pergerakan sangat dipengaruhi oleh tujuan pergerakan, waktu pergerakan, dan jarak juga waktu perjalanan. Ciri fasilitas sangat tergantung pada keandalan moda transportasi, efektivitas perjalanan, ketersediaan ruang dan keamanan juga kenyamanan. Analisis persentase pengguna moda transportasi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah pengguna moda transportasi tertentu dan membandingkannya dengan jumlah penduduk. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan Tahun 2024 antara lain :

- a. Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh angkutan umum, seperti kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan;
- b. Pelaksanaan survey
 - 1) mengetahui pola perjalanan, preferensi moda transportasi, dan masalah yang dihadapi pengguna;
 - 2) wawancara langsung atau pengisian kuesioner oleh responden di terminal kepada pengemudi dan pengguna layanan angkutan umum;
- c. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas angkutan umum

d. Integrasi dan Konektivitas:

- 1) Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi sehingga memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan;
- 2) Meningkatkan konektivitas antar moda transportasi dengan jaringan-jaringan trayek angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan perbatasan. Selain itu juga terdapat jaringan trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota antar Provinsi (AKAP);

e. Penggunaan teknologi dengan aplikasi Sistem Ngokolakeun Tarekah Izin Angkutan (SANGHIANG) yang bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui informasi mengenai perizinan
- 2) Mengetahui informasi laik jalan kendaraan

Kebijakan dan Regulasi dengan Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggunaan angkutan umum, seperti pembatasan kendaraan pribadi sesuai dengan aturan standar pelayanan minimal untuk angkutan umum dan penerapan tarif tidak melebihi batas atas dan batas bawah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan, Dishubkominfo pada Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 100,42%. Efisiensi yang dilakukan cukup besar yaitu sekitar 26,73% atau Rp. 85.925.050,00 dari alokasi anggaran Rp. 321.440.000,00 salah satunya adalah karena pada belanja sewa terminal

penyerapan hanya 39,16% karena adanya terminal yang kontraknya tidak diperpanjang. Meskipun demikian secara keseluruhan target indikator bisa tercapai bahkan terlewati.

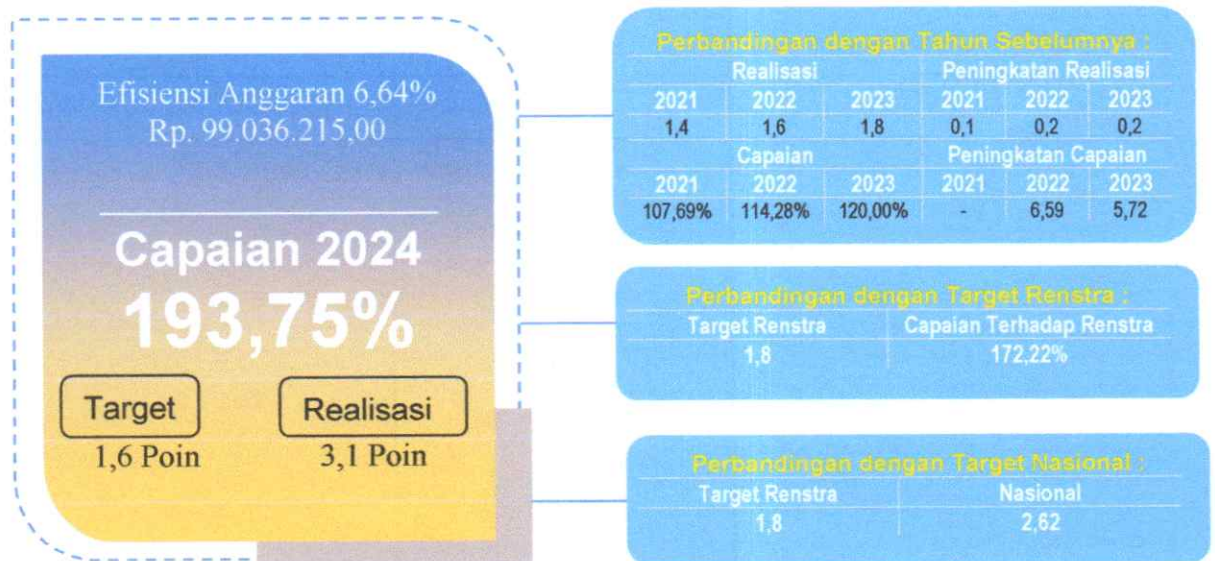
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)* dengan kegiatan terdiri dari *Pengelolaan Terminal Penumpang Type C* beserta sub kegiatannya, dan *Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya.

3.1.4 Sasaran 3

“Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE”

Indikator Kinerja ke-4 : Indeks Domain Tata Kelola SPBE



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,6 poin. Adapun realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE tahun 2024 adalah sebesar 3,1 poin. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 193,75%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 1,6 Poin realisasi kinerja sebesar 3,1 Poin dengan capaian sebesar 193,75%. Untuk tahun 2021 dari target kinerja sebesar 1,3 Poin realisasi kinerja sebesar 1,4 Poin dengan capaian sebesar 107,69%. Selanjutnya Tahun 2022 dari target kinerja sebesar 1,4 Poin realisasi sebesar 1,6 Poin dengan capaian sebesar 114,28%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 1,5 Poin realisasi sebesar 1,8 Poin dengan capaian sebesar 120,00%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2026. Realisasi kinerja Indeks

Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 adalah sebesar 3,1 Poin sedangkan target akhir tahun renstra Indeks Domain Tata Kelola SPBE adalah sebesar 1,8 Poin sehingga capaian kinerja Tahun 2024 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 172,22%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo Tahun 2024 dengan realisasi Indeks Domain Tata Kelola SPBE Nasional dapat kita lihat pada infografis di atas. Realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo tahun 2024 sebesar 3,1 Poin sedangkan realisasi Indeks Domain Tata Kelola SPBE secara nasional pada tahun 2024 sebesar 2,62 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Dishubkominfo Tahun 2024 melampaui realisasi Indeks Domain Tata Kelola SPBE nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 antara lain :

1. Kerja tim work untuk memenuhi semua eviden yang dirasa masih banyak kekurangan, sehingga adanya perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memenuhi kriteria setiap indikator penilaian SPBE, khususnya di domain satu untuk Indikator Kebijakan dan domain 4 untuk Layanan. contoh diantaranya

Revisi Perbup Penyelenggaraan SPBE nomor 69 tahun 2022 menjadi Perbup SPBE nomor 16 tahun 2024 untuk Domain satu dan Reviu2 tentang layanan Publik dan layanan Administrasi Pemerintahan untuk domain layanan;

2. Inovasi perubahan kinerja dari setiap SKPD menjadi pendorong untuk perubahan eviden SPBE yang signifikan;
3. Adanya tambahan sumberdaya manusia khusus bidang TIK;
4. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait penilaian SPBE;
5. Peningkatan Kolaborasi sistem penghubung layanan pemerintah;
6. Aplikasi yang saling terintegrasi.

Adapun nilai peningkatan evaluasi kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 diperoleh dari Domain 1 yaitu Indikator Kebijakan, domain 2 untuk Tata Kelola dan Domain 4 untuk Layanan Publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 193,75%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 6,64% atau Rp. 99.036.215,00 dari alokasi anggaran Rp. 1.492.450.000,00 target indikator telah terlampaui.

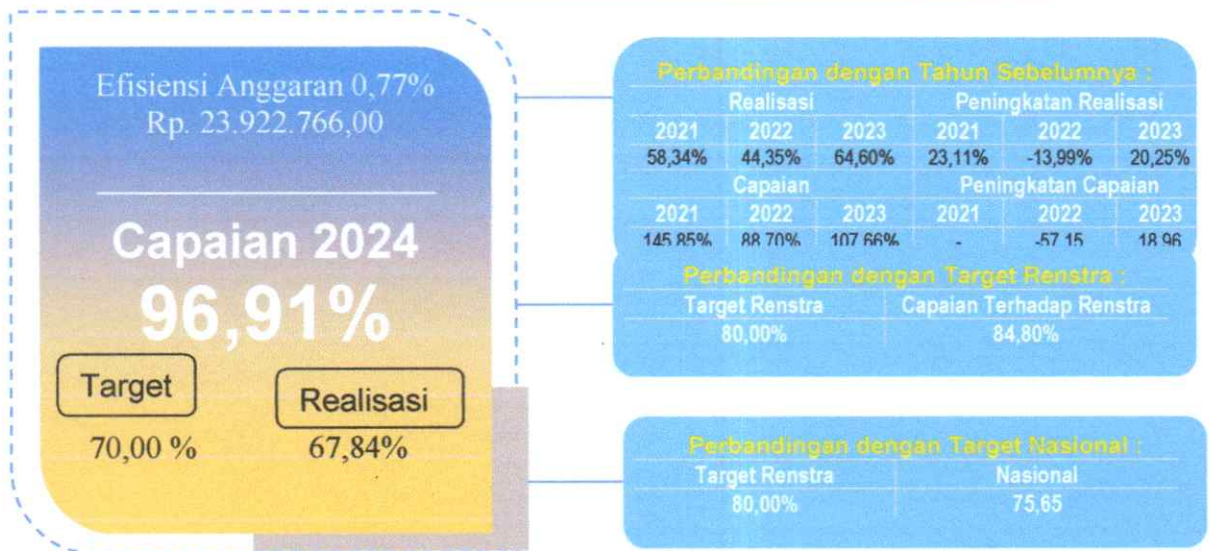
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Jalan adalah *Program Pengelolaan Aplikasi Informatika* dengan kegiatan terdiri dari *Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya, dan *Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya. Beberapa hal lainnya yang diperlukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah Peningkatan kinerja pegawai melalui Bimbingan Khusus TIK, Pengembangan Fungsional Prakom yang jelas di setiap Perangkat Daerah, Pembinaan yang berkelanjutan terkait SPBE untuk semua Perangkat Daerah, dan Evaluasi terhadap keberhasilan nilai SPBE Perangkat Daerah.

3.1.5 Sasaran 4

“ Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik”

Indikator Kinerja ke-5 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 ditargetkan sebesar 70%. Adapun realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 adalah sebesar 67,84% dengan kualifikasi “cukup informatif”. Hasil tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 96,91%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 dari target kinerja sebesar 70% realisasi kinerja sebesar 67,84% dengan capaian sebesar 96,91%. Untuk tahun 2021 dari target kinerja sebesar 40% realisasi kinerja sebesar 58,34% dengan capaian sebesar 145,85%. Selanjutnya Tahun 2022 dari target kinerja sebesar 50% realisasi sebesar 44,35% dengan capaian sebesar 88,70%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2023 dari target kinerja sebesar 60% realisasi sebesar 64,60% dengan capaian sebesar 107,66%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2026. Realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebesar 70% sedangkan target akhir tahun renstra Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah sebesar 80% sehingga capaian kinerja Tahun 2024 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 84,80%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2024 dengan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nasional

dapat kita lihat pada infografis di atas. Realiasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo tahun 2024 sebesar 67,84% sedangkan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik secara nasional pada tahun 2024 sebesar 75,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2024 masih jauh dari standar Nasional sehingga perlu upaya ekstra untuk mengimbangi standar Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Melihat realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dishubkominfo Tahun 2024 terdapat ketidaktercapaian target, meskipun dari sisi kualifikasi kategori masih tetap berada pada kategori yang sama yaitu “cukup informatif”. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 antara lain :

1. Belum meratanya pemahaman badan publik tentang keterbukaan informasi publik;
2. Masih adanya kekhawatiran tentang keterbukaan informasi.

Adapun alternatif solusinya antara lain adalah :

1. Perlunya pemahaman bersama dari setiap badan publik terhadap regulasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

2. Sosialisasi secara bertahap dengan menghadirkan narasumber dari instansi pembina keterbukaan informasi publik sendiri, yaitu Komisi Informasi;
3. Perlunya anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen organisasi keterbukaan informasi publik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96,91%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 0,77% atau Rp. 23.922.766,00 dari alokasi anggaran Rp. 3.097.775.000,00 target belum tercapai.

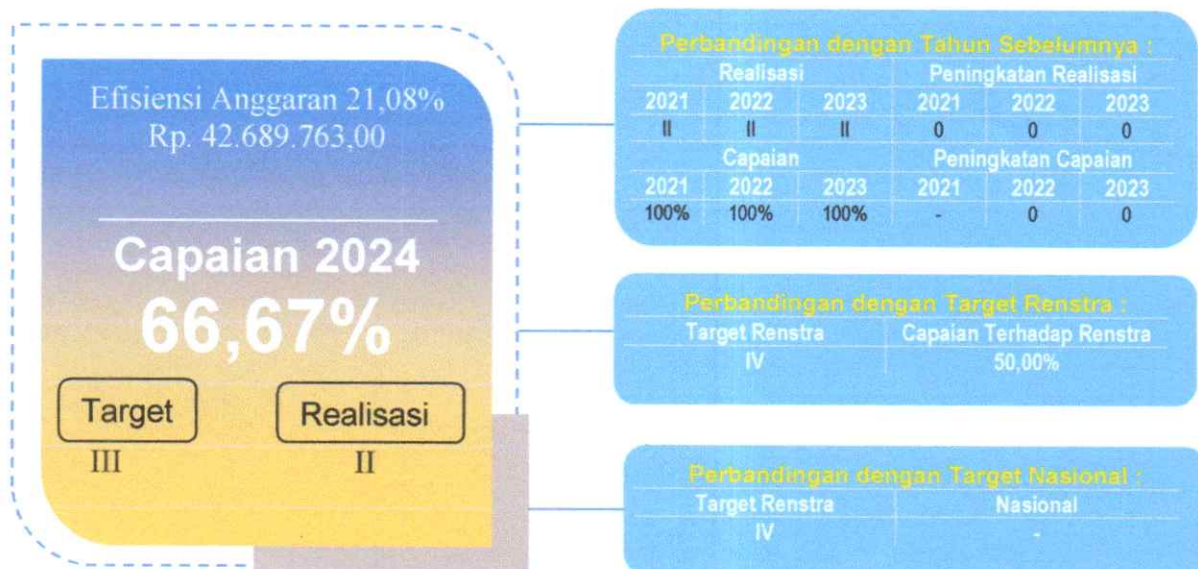
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah *Program Informasi dan Komunikasi Publik* dengan kegiatan *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatannya.

3.1.6 Sasaran 5

“ Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian dan Penerapan Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Indikator Kinerja ke-6 : Indeks KAMI



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks KAMI tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas. Indikator kinerja Indeks KAMI tahun 2024 ditargetkan pada Tingkat Kematangan Level III. Adapun realisasi kinerja Indeks KAMI tahun 2024 adalah pada Tingkat Kematangan Level II yang didefinisikan “Penerapan Kerangka Kerja Dasar”. Hasil tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 66,67%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks KAMI Tahun 2024 dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level III* realisasi kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 66,67%. Untuk tahun 2021 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* realisasi kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 100,00%. Selanjutnya Tahun 2022 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* realisasi pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 100,00%. Dan yang terakhir untuk Tahun 2023 dari target kinerja pada *Tingkat Kematangan Level II* realisasi pada *Tingkat Kematangan Level II* dengan capaian sebesar 100,00%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Indeks KAMI Tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra yaitu tahun 2026. Realisasi kinerja Indeks KAMI Tahun 2024 adalah pada *Tingkat Kematangan Level II* sedangkan target akhir tahun renstra Indeks KAMI adalah pada *Tingkat Kematangan Level IV* yang didefinisikan " Terkelola dan Terukur" sehingga capaian kinerja Tahun 2024 terhadap akhir tahun renstra adalah sebesar 50,00%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional di Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Melihat realisasi kinerja Indeks KAMI Dishubkominfo Tahun 2024 terdapat ketidaktercapaian target, realisasi masih tetap sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada *Tingkat Kematangan Level II* yang didefinisikan dengan “Penerapan Kerangka Kerja Dasar”. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja Indeks KAMI Tahun 2024 antara lain :

1. Urusan persandian masih dianggap kurang penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi yaitu tenaga Sandiman;
3. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Adapun alternatif solusinya antara lain adalah :

1. Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran;
2. Melakukan kerja sama dengan akademisi yang memiliki kemampuan keamanan siber;
3. Dilakukan tahap persiapan dalam penyusunan dokumen SMKI dengan meminta informasi kepada Kementerian, provinsi Jawa Barat dan daerah lain.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Pada indikator Indeks KAMI Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu pada *Tingkat Kematangan Level III* yang didefinisikan dengan "Terdefinisi dan Konsisten". Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran sebesar 21,08% atau Rp. 42.689.766,00 dari alokasi anggaran Rp. 202.550.000,00 target belum tercapai.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks KAMI adalah *Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi* dengan kegiatan *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* beserta sub kegiatan *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

3.2 ANALISIS KINERJA

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 – 2026 dengan misi 2 dan misi 4 dalam Renstra Perangkat Daerah dapat terealisasi sesuai dengan Target sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebesar 87,87 dari target 50,50. Hal ini di buktikan dengan gambar di bawah ini :

No	Perangkat Daerah	SELF ASSESSMENT			NILAI VERIFIKASI		
		RB MENUNJANG	RB TEMATIK	NILAI RB PD	RB GEBERAK	RB TEMATIK	NILAI RB PD
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	67,00	32,00	90,00	56,91	32,19	89,30
2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55,07	33,00	89,07	53,27	32,50	87,87
3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	54,78	32,03	86,91	55,62	31,39	87,52
4	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53,60	32,35	86,05	53,00	32,50	85,50
5	Sekretariat Daerah	52,90	26,28	79,77	52,79	32,47	85,26
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	52,33	31,11	83,46	53,82	31,50	83,42
7	Inspektorat Daerah	52,70	27,33	80,11	52,41	31,00	83,41
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51,84	31,29	83,33	50,80	32,47	83,27
9	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	47,09	32,27	79,36	47,00	31,87	78,88
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	48,86	31,75	80,61	49,10	28,19	77,49

2. Prosentase tingkat Keselamatan Jalan

Tingkat keselamatan jalan pada Tahun 2024 sebesar 82,19% dari target 81,20%

= 100 - (Jumlah Kecelakaan di wilayah hukum polres tasikmalaya + jumlah kecelakaan wilayah kab.Tasikmalaya wilayah kuhum polres tasikmalaya Kota/Panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya x 100%)

$$= 100 - \left\{ \frac{121 + 111}{1.303} \times 100\% \right\} = 100 - 17,81 = \mathbf{82,19\%}$$

3. Prosentase Pengguna moda Transportasi umum di perkotaan

Pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah sebesar 33,14 % dari target sebesar 33 %.

Jumlah Rata-rata Penumpang pada Tahun n
jumlah kapasitas penumpang pada 4 Tipe Kendaraan Angkum

$$= \frac{654.007}{1.973.411} = 0,3314 \times 100 = \mathbf{33,14\%}$$

4. Indeks Domain Tata Kelola SPBE pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengacu PP No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan MenPANRB No. 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasilnya mencapai nilai 3,10 hal ini di buktikan dengan gambar di bawah ini :

Informasi penilaian SPBE

Hasil Evaluasi SPBE 2024		
Nama Form Tahun	Evaluasi SPBE Tahun 2024	
Deskripsi	:2024	
	Sesuai Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menegakkan asas-asas SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengacu perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemertanian dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan index yang diperoleh secara Informatik, yang akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.	
Pemerintah Kab. Tasikmalaya	Pemerintah Kabupaten	
K/L/D	:3,78	
Indeks SPBE	:Sangat Baik	
Predikat SPBE	Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	4,4	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,4	
Domain Tata Kelola SPBE	3,1	
Pencapaian Strategi SPBE	1,75	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,5	
Penyelenggara SPBE	3	
Domain Manajemen SPBE	1	
Penerapan Manajemen SPBE	1	
Pelaksanaan Audit TIK	1	
Domain Layanan SPBE	4,94	
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,9	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5	
Rekap Tingkat Kematangan		
No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Data Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pengembangan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Data Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Kolaborasi Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pengembangan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengembangan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsifan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengembangan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

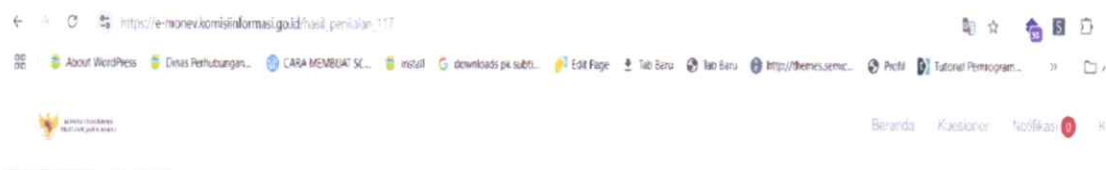
Berdasarkan Monev yang dilaksanakan panrb dimana hasil peniliannya bisa dilihat dari website tauval.spbe.go.id.

Cara perhitungan indeks Domain Tata Kelola SPBE sebagai berikut :

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Cara Perhitungan	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	<p>menggunakan Rumus penilaian pada Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020</p> $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$	poin	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 Penilaian yang diberikan Komisi Informasi untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari semula Tahun 2023 sebesar 64,60% menjadi 67,84% dari target 70%, untuk daftar penilaian sebagai berikut :



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Redes Publik

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Rekap Penilaian:

Nilai Verifikator (80%)

50,84

1. KUALITAS INFORMASI 11,4
2. PELAYANAN INFORMASI 16,3
3. JENIS INFORMASI 8,2
4. KOMITMEN ORGANISASI 16,5
5. SARANA DAN PRASARANA 7,4
6. DIGITALISASI 11,25

Cek Hasil Monev

Nilai Presentasi (20%)

3,4

nilai presentasi: 17

Nilai Akhir

67,84

Kualifikasi

* Cukup Informatif *

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mendapat peringkat yang cukup baik, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meraih predikat *cukup informatif* meskipun Target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Cara perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Instrumen Penilaian Kominsi Informasi tentang Monitoring dan evaluasi Penerapan Keterbukaan dapat diakses melalui (<https://komisiinformasi.go.id>)

6. Indeks KAMI

Pada Tahun 2024 Capaian Indek KAMI hanya pada kategori II, belum sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu pada kategori III. Adapun untuk penilaian Indeks KAMI, menggunakan instrumen penilaian yang dapat dilihat pada (<https://bssn.go.id/indeks-kami/>)



3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menangani 3 Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan Urusan tersebut, untuk memenuhi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 43.630.113.297,00 yang terdiri dari anggaran belanja Operasi berupa belanja pegawai sebesar Rp. 8.957.807.297,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 30.295.805.300,00 serta belanja modal sebesar Rp. 4.376.500.700,00 yang diselenggarakan dalam 5 program, 19 kegiatan serta 41 sub kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi	Realisasi	
	Total Pagu	43.630.113.297	42.018.113.688	96,31
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.176.193.297	32.920.453.082	96,33

a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.847.500	109.848.400	92,43
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.847.500	51.887.900	96,36
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	34.918.800	99,77
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	23.041.700	76,81
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.803.897.297	8.587.184.436	97,54
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.803.897.297	8.587.184.436	97,54
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	30.000.000	30.000.000	100,00
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	30.000.000	100,00
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.970.000	93.103.000	93,13
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.970.000	93.103.000	93,13
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.334.025.000	1.319.124.474	98,88
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	326.550.000	318.999.080	97,69
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	55.000.000	100,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	505.525.000	498.385.600	98,59
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	25.970.000	99,88
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	100,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.950.000	390.769.794	99,95
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.260.000	165.180.000	99,35
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.260.000	165.180.000	99,35
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.943.273.500	21.969.020.904	95,75

14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.043.613.500	21.095.420.904	95,70
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.660.000	873.600.000	97,10
h	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	679.920.000	646.991.868	95,16
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	505.220.000	472.321.868	93,49
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	94.970.000	99,97
18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	79.700.000	79.700.000	100,00
B	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</i>	4.661.145.000	4.470.534.350	95,91
i	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	3.350.000.000	3.297.071.900	98,42
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.950.000.000	2.913.683.400	98,77
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	400.000.000	383.388.500	95,85
j	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	291.440.000	206.264.950	70,77
21	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	140.000.000	54.826.050	39,16
22	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	151.440.000	151.438.900	100,00
k	<i>Kegiatan Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir</i>	90.000.000	89.995.000	99,99
23	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	89.995.000	99,99
l	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	240.000.000	209.137.500	87,14

24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.000.000	129.825.000	81,14
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.000.000	79.312.500	99,14
m	<i>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	605.805.000	584.975.000	96,56
26	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	468.995.000	463.745.000	98,88
27	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77.080.000	61.780.000	80,15
28	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.730.000	59.450.000	99,53
n	<i>Kegiatan Persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalanan Kabupaten/Kota</i>	53.900.000	53.840.000	99,89
29	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	53.900.000	53.840.000	99,89
o	<i>Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	29.250.000	97,50
30	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	29.250.000	97,50
C	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.097.775.000	3.073.852.234	99,23

p	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i>	3.097.775.000	3.073.852.234	99,23
31	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	172.620.000	166.618.968	96,52
32	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	765.155.000	757.033.123	98,94
33	Layanan Hubungan Media	1.160.000.000	1.155.835.143	99,64
34	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.000.000.000	994.365.000	99,44
D	<i>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</i>	1.492.450.000	1.393.413.785	93,36
q	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	299.721.000	266.097.500	88,78
35	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	299.721.000	266.097.500	88,78
r	<i>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.192.729.000	1.127.316.285	94,52
36	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	685.000.000	682.758.000	99,67
37	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	135.873.900	97.235.180	71,56
38	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	146.000.000	145.936.800	99,96
39	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	55.900.000	32.824.705	58,72
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	169.955.100	168.561.600	99,18
E	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</i>	202.550.000	159.860.237	78,92

s	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	202.550.000	159.860.237	78,92
41	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	202.550.000	159.860.237	78,92

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, Realisasi Belanja Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 42.018.113.688,00 atau 96,31% dari anggaran Rp. 43.630.113.297,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 37.736.662.188,00 atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp. 39.253.612.597,00. Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp. 4.281.451.500,00 atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp. 4.376.500.700,00.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya laporan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dishubkominfo Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. Saran

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, yakni :

1. Sumberdaya manusia yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait ketersediaan anggaran pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan kompetensi pegawai di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. Penambahan sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
3. Penyusunan Grand Design penataan parkir di Kabupaten Tasikmalaya;
4. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi bagi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
6. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perhubungan;
7. Berkoordinasi lebih komprehensif dengan SKPD Lainnya di Tingkat Kabupaten serta dengan Dinas/Kementerian terkait untuk Tingkat Provinsi dan Pusat;
8. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai sarana komunikasi internal pemerintah, layanan akses internet, dan komunikasi data antar SKPD;
9. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi;
10. Peningkatan keamanan informasi mulai dari pembentukan CISRT dan peningkatan infrastruktur keamanan informasi;

11. Penerapan Integrasi data melalui teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada aplikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda